DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Lamintang, P. A. F., & Lamintang, T. (2009). *Delik-Delik Khusus: Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan* (Edisi 2). Sinar Grafika.

Muwahid. (2016). *Pokok-Pokok Hukum Agraria Di Indonesia* (Edisi 1). UIN SA Press.

Pendidikan Indonesia, D. (2002). *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Edisi 3). Balai Pustaka.

Susiani, D. (2022). *Hukum dan Hak Asasi Manusia* (T. Media (ed.); Edisi 1). Tahta Media Group.

Syamsudin, A. (2021). *Proses & Teknik dan Penyusunan Undang-Undang* (Soewisnu (ed.); Edisi 3). Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Presiden Nomor 177 Tahun 2024 Tentang Badan Pertanahan Nasional

Sumber lain:

Aprita, S., & Hasyim, Y. (2020). *HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA* (Edisi 1). Mitra Wacana Media. www.mitrawacanamedia.com

Arifin, Z., Anzward, B., & Kadir Putra, J. (2020). Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Penyerobotan Tanah Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Di Kelurahan Nipah-Nipah. *Lex Suprema*, *2*, 289–308.

Christina Melani Putong, A., Sumampow, J., & Nachrawy, N. (2025). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG SERTIFIKAT TERHADAP PERBUATAN

PENYEROBOTAN HAK ATAS TANAH. *Lex Privatum*, *15*(2), 201–206.

Deklarasi Hak Asasi Manusia ASEAN

Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (DUHAM)

Dwi Putranto N., P., & Setyvani P., G. (2024). *Mbah Siyem Laporkan Pemdes di Grobogan ke Mapolda Atas Dugaan Penyerobotan Tanah Waris*. Kompas. https://regional.kompas.com/read/2024/06/25/141623478/mbah-siyem-laporkan-pemdes-di-grobogan-ke-mapolda-atas-dugaan-penyerobotan

Dwi Putranto N., P., & Setyvani P., G. (2024). *Tangis Mbah Siyem Bersaudara, Tanah 1,7 Hektar Warisan Bapak Berubah Jadi Aset Desa di Grobogan*. Kompas. https://regional.kompas.com/read/2024/05/30/140558978/tangis-mbah-siyem-bersaudara-tanah-17-hektar-warisan-bapak-berubah-jadi?page=all

Ferdy, Madiong, B., & Salam Siku, A. (2023). Tindak Pidana Penyerobotan Tanah. In R. Renggong & A. Tira (Eds.), *Pusaka Almaida* (Edisi 1, Vol. 1, Issue 1). Pusaka Almaida.

Gialdah, B. T., & Arifin, F. (2019). Model Pendidikan Hukum Dalam Upaya Mewujudkan Kesadaran Hukum Siswa Sejak Dini. *Jurnal Litigasi*, *20*(1), 19–56.

Kusnianto, H. (2024). Akibat Hukum Pelaku Penyerobotan Tanah Dalam Aspek Hukum Pidana Indonesia. *Legalitas*, *9*(1), 113–118. https://doi.org/10.31293/lg.v9i1.8015

Mais, T. (2023). *Warga di Manado Polisikan Developer Perumahan Mewah Dugaan Penyerobotan Lahan*. DetikNews. https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-6762626/warga-di-manado-polisikan-developer-perumahan-mewah-dugaan-penyerobotan-lahan

Malaka, Z. (2018). Kepemilikan Tanah dalam Konsep Hukum Positif Indoensia, Hukum Adat dan Hukum Islam. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, *21*(1), 103–127. https://doi.org/10.15642/alqanun.2018.21.1.103-127

Mandasari Saragih, Y., Hadiyanto, A., & Subagyo Eko Prasetyo, M. (2022). Pengantar Hukum Pidana Indonesia (Transisi Hukum Pidana Di Indonesia). In B. Aditi (Ed.), *CV. Tungga Esti* (Edisi 1, Issue 1). CV. Tungga Esti. https://books.google.co.id/books?id=fGLBEAAAQBAJ

Nanempa, J. (2023). *The City Manado Diduga Serobot Lahan Warga, BPN Temukan Fakta Mengejutkan Saat Lakukan Pengukuran*. Halosulawesi. https://halosulawesi.com/the-city-manado-diduga-serobot-lahan-warga-bpn-temukan-fakta-mengejutkan-saat-lakukan-pengukuran/

Rahmaswary, D., & Ngadino. (2019). Perlindungan Hukum Penyerobotan Tanah Hak Milik Dalam Aspek Pidana (Studi Kasus Nomor:24/G/2013/Ptun-Bl). *Notarius*, *12*, 731–742.

Rondonuwu, G. (2017). Kepastian Hukum Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli Berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. *Lex Privatum*, *5*(4), 114–121.